

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Pertama, Candra Pratama, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, *et al.*, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrae, Fockema, 1960, Webster Student Dictionary, dalam Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, Sebagaimana dikutip dari Mambaya, Marthinus, 2015, *Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum dan Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Black, Campbell Henry, 1983, *Black's Law Dictionary With Pronounciations*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, dalam Elwi Danil.
- Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rehtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht.

- Chik, Tambi, Haji, Faiza, 2001, *Mengenal Mahkamah Malaysia*, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelong, Selangor.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2007, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti, *et al.*, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, West, a Thomson Business, United States of America.
- Girsang, Juniver, 2012, *Abuse Of Power, (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, JG Publishing, Jakarta.
- Gunarto, Priyo, Marcus, & Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamdan, M, 1997, *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta.
- _____, 1994, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

_____, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Istanto, Sugeng F, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.

Jayadi, Ahkam , 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.

JSSP, 2015, *Penerapan Sistem Kamar Untuk Menjaga Kesatuan Hukum*, Edisi Pertama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Latif, Abdul & Hasbi Ali, 2016, *Politik Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

MD, Mahfud, Moh, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, LP3ES Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Rusli, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh & Abdul H. Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Remelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rifa'i, Amzulian "et al", 2010, *Wajah Hakim Dalam Putusan Studi Atas Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Rohrohmana, Basir, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Empat Belas Masalah Aktual Hukum Pidana*, LoGos Publishing, Bandung.
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- _____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutatiek, Sri, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Utrecht, 1961, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Viano, Emilo C, 1976, *Victim and Society*, Visage Press, Washington D.C.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wisnubroto, Aloysius, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia, dalam Beberapa Aspek Kajian*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- _____, & Gregorius Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM02.3/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara Yang Telah Diminutasi Pada Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Karya Ilmiah

Supriyadi, 2015, "Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum Oleh Militer Di Indonesia" *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sudaryati, Tris, 2005, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Madalina, 2006, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Febrina, Regar Vina, 2017, "Kewenangan Jaksa Pada Tahap Penuntutan Sebagai Upaya Pemenuhan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Emong, Komariah “*et al*”, 2008, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Cetakan I), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.

D. Jurnal

Ramadhan, Choky R, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dan RUU KUHAP*, MaPPI FHUI, Volume 1, Agustus 2014.

E. Internet

“Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun”, <https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018.

“Korupsi, Ketua DPR Papua Divonis 1 Tahun 10 Bulan”, <https://nasional.tempo.co/read/453324/korupsi-ketua-dpr-papua-divonis-1-tahun-10-bulan>, di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

“Permohonan PH Terdakwa Ditolak, Kasus Korupsi Pengadaan Batik Berlanjut”, <https://www.pasificpos.com/item/722-permohonan-ph-terdakwa-ditolak-kasus-korupsi-pengadaan-batik-berlanjut>, diakses pada tanggal 1 juni 2018.

“Kejari Diminta Jangan Berkompirasi Dalam Kasus Batik Kota Jayapura”, <https://lodarkou.com/2017/11/09/kejari-diminta-jangan-berkompirasi-dalam-kasus-batik-kota-jayapura/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2018.

“Sidang Perdana Bupati Sarmi, PH akan Eksepsi dakwaan JPU”, http://richardjurnalis.blogspot.com/2015/08/sidang-perdana-bupati-sarmi-ph-akan_25.html, di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

“Kembali Hakim Tipikor Jayapura Memutus Bebas Terdakwa Korupsi”, <https://kabarpapua.co/kembali-hakim-tipikor-jayapura-memutus-bebas-terdakwa-korupsi/> di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

“Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Papua”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3434/kunjungan-kerja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-empat-lingkungan-peradilan-di-wilayah-provinsi-jayapura>, di akses pada tanggal 01 April 2019.

“12 Hakim Harus Tangani 936 Perkara, Tertinggi Kasus Narkoba”,
<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/03/117520/12-hakim-harustangani936perkara-tertinggi-kasus-narkoba>, di akses
pada tanggal 01 April 2019.

“Mahkamah Agung: Indonesia Kekurangan 4.000 Hakim”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180719065206-12-315260/mahkamah-agunindonesia-kekurangan-4000-hakim>, di akses
pada tanggal 01 April 2019.